

7-2014

Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat

Khairunnisa Khairunnisa

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, nisasetiadi@gmail.com

Sri Hartoyo

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, hartoyosri@yahoo.com

Lukytawati Anggraeni

Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, lukytawati.anggraeni@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi>



Part of the [Economics Commons](#)

Recommended Citation

Khairunnisa, Khairunnisa; Hartoyo, Sri; and Anggraeni, Lukytawati (2014) "Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*: Vol. 15: No. 1, Article 5.

DOI: 10.21002/jepi.v15i1.05

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol15/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat *Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java*

Khairunnisa^{a,*}, Sri Hartoyo^a, Lukytawati Anggraeni^a

^aFakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

Abstract

West Java province's junior secondary school enrollment rate is still below the Millenium Development Goal of universal primary education by 2015. Panel data of 26 districts in West Java, Indonesia, was used to analyze the determinant factors of junior secondary school enrollment rate. The study shows that GRDP per capita and education level of the household head positively influence junior secondary enrollment rate, in contrast poverty rate and number of child labour had negative impact. This study suggests that government should increase local revenue to enable the people to have sufficient income for attending school, especially for the poor. The government is also expected to increase the availability of schools.

Keywords: Education; Determinant; Secondary School; Enrollment Rate; Poverty

Abstrak

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP Provinsi Jawa Barat yang masih rendah menunjukkan belum tercapainya tujuan MDGs tahun 2015 tentang pendidikan dasar. Dengan menggunakan analisis regresi data panel 26 kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2007–2011, studi ini menemukan bahwa faktor yang menjadi determinan APS SMP adalah PDRB per kapita dan pendidikan orang tua. Adapun kemiskinan dan partisipasi kerja anak usia 13–15 tahun akan mengurangi partisipasi sekolah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi sekolah SMP, terutama anak dari keluarga miskin, selain peningkatan anggaran pendidikan untuk mendukung partisipasi sekolah (beasiswa dan ketersediaan/fasilitas sekolah), hal itu juga harus didukung dengan penurunan tingkat kemiskinan. Selain itu, peningkatan anggaran pendidikan lebih pro-masyarakat miskin dengan meningkatkan ketersediaan sekolah.

Kata kunci: Pendidikan; Determinan; Sekolah Menengah; Partisipasi Sekolah; Kemiskinan

JEL classifications: I21; I28; I30; J16

Pendahuluan

Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai perluasan akses masyarakat terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan manusia kare-

na pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai penggerak utama pembangunan merupakan salah satu faktor penting pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kepedulian dunia internasional terhadap pendidikan diwujudkan dalam gerakan global Pendidikan untuk Semua (PUS) atau *Education for All* pada tahun 1990 dan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) pada tahun 2000. Terkait pendidikan dasar, target MDGs pada 2015 ada-

* Alamat Korespondensi: Jln. Layungsari 3 No. 13 Bogor Selatan, Bogor. Telp.: 02518325479. E-mail: nisasetiadi@gmail.com.

lah diharapkan semua anak laki-laki dan perempuan usia 7–15 tahun di seluruh dunia dapat menikmati pendidikan dasar 9 tahun. Tujuan MDGs menganggap bahwa penyelesaian pendidikan dasar, bersama dengan pencapaian MDGs lainnya, akan membantu mewujudkan tujuan mengurangi separuh jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan pada tahun 2015.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014, disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan manusia Indonesia adalah tercapainya pendidikan dasar bagi seluruh anak di Indonesia dan penurunan kesenjangan pendidikan antarwilayah. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menjamin hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berusia 7–15 tahun.

Program perluasan dan pemerataan kesempatan belajar di Indonesia telah dilakukan sejak awal 1970-an yang dituang dalam program Wajib Belajar Sekolah Dasar pada tahun 1984 dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 1994. Program ini bertujuan agar setiap anak dapat menikmati pendidikan dasar 9 tahun, yaitu pendidikan setingkat SD selama 6 tahun ditambah pendidikan SMP selama 3 tahun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas di Indonesia baru mencapai 7,9 tahun. Hal itu berarti masih ada selisih 1,1 tahun dari target pendidikan dasar 9 tahun. Dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), pencapaian di jenjang SD hampir mendekati target MDGs, yaitu sebesar 95,50% pada tahun 2000 menjadi 97,49% pada tahun 2011. Namun, pencapaian di jenjang SMP baru mencapai 87,58% pada 2011.

Data BPS tentang pencapaian jenjang pendidikan SD menunjukkan angka putus sekolah yang lebih baik, yaitu 0,67%. Untuk tingkat SMP, angka putus sekolahnya lebih tinggi, yaitu 2,21%. Seiring dengan itu, tingkat APS jenjang SMP yang masih rendah dan angka pu-

tus sekolah yang masih tinggi menjadi tantangan bagi pemerintah agar memberikan perhatian dan upaya yang lebih baik dengan memberi akses yang lebih luas untuk jenjang SMP. Tujuannya agar tercapai program wajib belajar 9 tahun dan 100% anak usia 7–15 tahun mendapatkan pendidikan dasar pada tahun 2015 sesuai dengan target MDGs.

Pada tahun 2011, BPS mencatat rata-rata APS SMP untuk Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa berbeda secara signifikan, yaitu sebesar 90,35% untuk wilayah Jawa dan sebesar 87,18% untuk wilayah luar Jawa. Hal ini menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa dibanding di luar Pulau Jawa. Namun, di antara provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan capaian APS terendah pada semua jenjang pendidikan termasuk jenjang SMP, yaitu sebesar 85,69% (Tabel 2).

Padahal, Jawa Barat berperan sebagai *agent of development* (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional (Sugiatmo, 2011). Hal itu dapat dilihat dari jumlah penduduk terbesar, yaitu sebanyak 43 juta jiwa dan penyumbang PDRB ketiga terbesar di Indonesia pada tahun 2011 setelah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selain itu, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jawa Barat merupakan yang terbesar se-Pulau Jawa. Dengan letak yang berbatasan langsung dengan pusat kekuasaan dan perekonomian, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat diasumsikan memiliki akses yang lebih baik bagi pendidikan (Tabel 1). Ternyata, selain APS SMP yang rendah, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Jawa Barat hanya 7,9 tahun. Hal ini tentu menghambat program wajib belajar 12 tahun yang sedang dirintis Provinsi Jawa Barat.

Sejak Juli 2005, pemerintah telah melaksanakan program BOS yang merupakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan

Tabel 1: Peranan PDRB atas Dasar Harga Berlaku, Alokasi Dana BOS, dan APS SMP Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011

Provinsi	Peranan PDRB		Alokasi Dana BOS (juta rupiah)	APS SMP (%)
	Migas (%)	Tanpa Migas (%)		
DKI Jakarta	16,3	17,7	689.750	92,01
Jawa Barat	14,3	15,0	3.311.261	85,69
Banten	3,2	3,5	747.929	88,36
Jawa Tengah	8,3	8,0	2.742.641	88,39
DIY	0,9	0,9	295.677	97,59
Jawa Timur	14,7	16,0	2.594.107	90,04

Sumber: BPS (2012) dan Kemdikbud (2011), diolah

Tabel 2: Partisipasi Sekolah Anak Usia 13–15 Tahun Provinsi Jawa Barat Tahun 2007–2011 (dalam persen)

Tahun	Belum/Tidak Pernah Bersekolah	Sedang Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
2007	0,38	79,91	19,71
2008	0,23	79,88	19,89
2009	0,48	81,82	17,70
2010	0,41	82,73	16,86
2011	0,41	85,69	13,90

Sumber: Susenas (2007–2011), diolah

dan terkait dengan program wajar pendidikan dasar (dikdas) 9 tahun. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses rakyat ke pendidikan dasar, khususnya bagi rakyat miskin. Dilihat dari alokasi dana BOS, Jawa Barat memiliki anggaran terbesar se-Pulau Jawa. Sejalan dengan hal itu, APS SMP Jawa Barat pun mengalami peningkatan dari 76,44% pada tahun 2005 menjadi 85,69% pada tahun 2011. Namun, masih rendahnya APS SMP di Jawa Barat menggambarkan masih banyak anak usia 13–15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bagi anak usia 7–15 tahun di Jawa Barat belum dapat tercapai sesuai dengan target MDGs.

Selain itu, disparitas APS SMP yang tinggi merupakan tantangan bagi pemerintah daerah agar tercapai tujuan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua. Purwanto (2010) menemukan bahwa terjadi disparitas partisipasi sekolah di antara kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini terjadi pula di Jawa Barat (Gambar 1). APS tertinggi di Jawa Barat adalah Kota Cirebon sebesar 95,71%, diikuti Kota Bekasi se-

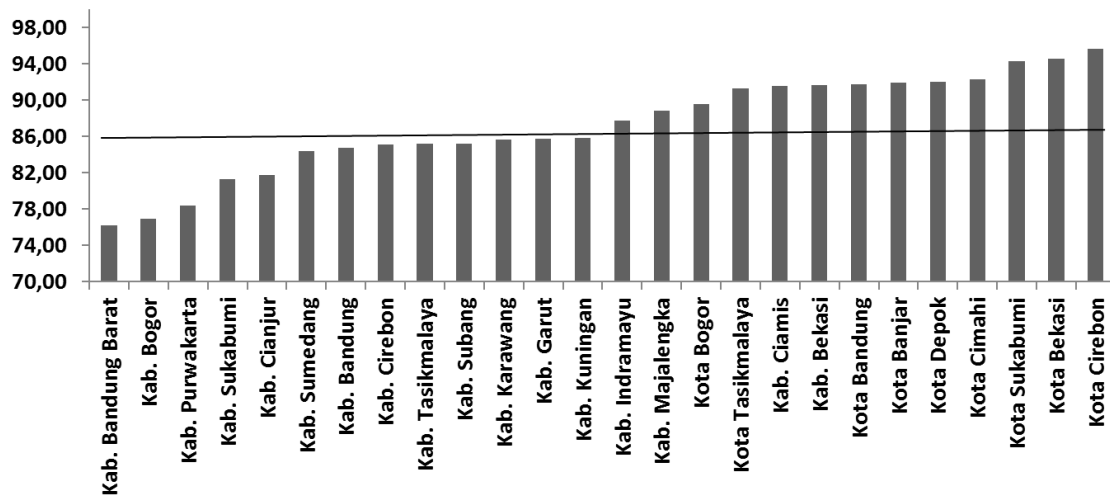
besar 94,56%. Adapun kabupaten dengan APS terendah adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta, yaitu sebesar 76,20%, 76,95%, dan 78,40% (Tabel 3).

Berdasarkan pemaparan di atas, banyak faktor yang memengaruhi capaian pendidikan di suatu wilayah, baik dari segi ketersediaan fasilitas pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kondisi sosial ekonomi Provinsi Jawa Barat yang beragam memberikan tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mencapai tujuan tuntas Wajar Dikdas 9 tahun sekaligus mencapai tujuan MDGs kedua pada tahun 2015. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan studi tentang perkembangan capaian pendidikan dalam hal ini APS untuk jenjang SMP dan determinannya di wilayah Jawa Barat. Sehingga, studi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis determinan perkembangan APS SMP di Jawa Barat.

Tabel 3: APS SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2007–2011 (dalam persen)

Kabupaten	2007	2008	2009	2010	2011
01. Bogor	77,19	78,55	75,35	78,95	76,95
02. Sukabumi	74,27	78,70	80,34	79,50	81,32
03. Cianjur	72,63	74,25	78,86	74,90	81,79
04. Bandung	80,40	81,72	83,57	83,17	84,73
05. Garut	77,24	78,00	79,97	79,68	85,79
06. Tasikmalaya	80,68	80,32	75,81	78,36	85,18
07. Ciamis	81,02	80,54	83,38	86,36	91,55
08. Kuningan	80,58	79,67	85,39	83,73	85,88
09. Cirebon	76,77	73,93	80,29	74,63	85,10
10. Majalengka	76,39	78,63	87,55	84,47	88,82
11. Sumedang	73,02	71,82	89,42	85,30	84,40
12. Indramayu	80,21	80,78	87,70	76,80	87,72
13. Subang	82,84	84,64	87,85	89,24	85,22
14. Purwakarta	79,14	78,28	79,42	74,84	78,40
15. Karawang	79,79	79,84	78,40	89,58	85,70
16. Bekasi	82,41	83,88	79,24	86,22	91,69
17. Bandung Barat	69,75	71,68	73,17	84,15	76,20
71. Kota Bogor	87,77	88,40	88,96	83,94	89,60
72. Kota Sukabumi	76,52	81,68	85,47	87,63	94,32
73. Kota Bandung	91,91	91,16	86,74	84,93	91,73
74. Kota Cirebon	88,89	87,25	84,96	89,91	95,71
75. Kota Bekasi	94,56	94,28	89,19	92,17	94,56
76. Kota Depok	91,39	91,77	85,71	96,00	92,02
77. Kota Cimahi	89,33	91,30	84,07	94,03	92,32
78. Kota Tasikmalaya	85,20	87,72	87,49	85,49	91,33
79. Kota Banjar	89,36	91,16	88,44	88,58	91,92

Sumber: BPS (2007–2011), diolah

**Gambar 1:** APS SMP Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 (dalam persen)

Sumber: BPS (2012), diolah

Tinjauan Referensi

Ekonomi Pendidikan

Studi ekonomi pendidikan didasarkan pada penerapan konsep fungsi produksi pada proses pendidikan. Konsep *Education Production Function* (EPF) dikembangkan oleh ekonom yang menekuni *applied economics*, khususnya *education economics*. Sekolah dapat diperlakukan secara analitis sebagai unit produksi di sisi penawaran dengan beberapa pengecualian, sekolah tidak memaksimalkan keuntungan perusahaan seperti pada fungsi produksi pada umumnya, dan kebanyakan dari sekolah menjadi barang publik atau swasta nirlaba (Boissierre, 2004). Ide dasar dari menggunakan *input* modal, tenaga kerja, dan lainnya untuk menghasilkan *output* tertentu dapat dimodifikasi untuk menganalisis *input* dari pendidikan untuk menghasilkan *output* tertentu dari pendidikan. Dalam hal ini, *output*-nya adalah pencapaian hasil pendidikan seperti hasil skor suatu tes atau hasil ujian kelulusan suatu wilayah (Boissierre, 2004). Dalam perkembangannya, banyak faktor dapat digunakan untuk melakukan pendekatan menghitung *outcomes* pendidikan. *Input* model di atas bisa dimodifikasi sebagai variabel-variabel yang dapat digunakan untuk menghitung suatu *outcomes* tertentu yang menjadi target suatu pemerintahan. Faguet dan Sanchez (2006) menggunakan kenaikan partisipasi sekolah sebagai indikator *outcomes*. Akai *et al.* (2007) menggunakan skor dari tes yang diuji kepada murid sekolah setingkat SD dan SMP, sedangkan Purwanto (2010) dan Listianawati (2012) menggunakan angka partisipasi sekolah.

Pendidikan dan PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita dapat mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan sehingga pendidikan masyarakat akan terus meningkat saat pendapatan mereka meningkat. Menurut Todaro dan Smith

(2006), ada dua biaya pendidikan, yaitu biaya pendidikan langsung individual dan biaya pendidikan tidak langsung. Biaya pendidikan langsung individual inilah yang berkenaan langsung dengan pendapatan per kapita masyarakat. Biaya pendidikan langsung individual adalah biaya yang ditanggung siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya oportunitas yang ditanggung karena memilih untuk sekolah, bukan alternatif lain, misalnya bekerja.

Biaya pendidikan langsung individual meliputi uang untuk membayar iuran sekolah, membeli buku, membeli pakaian seragam, membayar ongkos transportasi ke sekolah, dan lainnya. Adapun tingkat permintaan terhadap pendidikan ini berbanding lurus dengan besarnya biaya pendidikan langsung individual. Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani seorang siswa, maka semakin besar biaya pendidikan langsung individual yang ditanggung (orang tua) siswa. Bagi penduduk yang berpenghasilan rendah, biaya langsung penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar saja sudah membebani mereka dan menghabiskan sejumlah besar pendapatan riil mereka.

Pendidikan dan Investasi

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang akan memberi keuntungan pada masa depan, baik bagi masyarakat, negara, maupun orang yang menjalani pendidikan itu. Investasi publik di bidang pendidikan akan memberi kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) andal semakin bertambah pula. Meningkatnya pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Pada gilirannya, semua akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan hal ini akan memajukan perekonomian masyarakat berupa bertambahnya kesempatan kerja dan berkurangnya kemiskinan.

Investasi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *private investment* dan *public investment*. *Private investment* merupakan investasi pendidikan pada level mikro atau tingkat individu. Bentuk *private investment* adalah individu yang mengenyam bangku pendidikan formal maupun nonformal, sedangkan bentuk *public investment* merupakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah dalam bentuk penyediaan gedung sekolah, lembaga pendidikan, guru, dana pendidikan, penyediaan infrastruktur pendidikan, dan sebagainya (Todaro dan Smith, 2006).

Kualitas modal (sumber daya) manusia yang ditunjukkan melalui tingkat pendidikan dan angka partisipasi sekolah dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran sama halnya dengan barang atau jasa ekonomi lain. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa, pada sisi penawaran (oleh negara), pendidikan dibatasi tingkat pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Adapun permintaan terhadap pendidikan merupakan suatu "permintaan tidak langsung" atau permintaan turunan (*derived demand*), yaitu permintaan terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern.

Lebih lanjut, Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa permintaan ditentukan oleh kombinasi pengaruh dari empat variabel, yaitu (1) selisih atau perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dan sektor tradisional; (2) probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan; (3) biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya; dan (4) biaya tidak langsung atau biaya oportunitas pendidikan.

Selain itu, ada beberapa variabel penting lain yang bersifat non-ekonomi, seperti pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial, pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga, yang sangat memengaruhi tingkat permintaan terhadap pendidikan (Glewwe, 2002).

JEPI Vol. 15 No. 1 Juli 2014

Dengan kata lain, permintaan terhadap pendidikan berupa membandingkan biaya pendidikan (butir 3 dan 4) yang harus dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh (butir 1 dan 2). Perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dan total manfaat atau pendapatan yang akan diperoleh dari para lulusannya pada masa depan dihitung sebagai tingkat pengembalian investasi pendidikan (*rate of return to education*). Tingkat pengembalian dari investasi pendidikan ini dapat bersifat sosial atau individu. Tingkat pengembalian yang bersifat sosial berupa semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya produktivitas sehingga *output* perekonomian suatu wilayah juga meningkat. Adapun tingkat pengembalian yang bersifat individu, misalnya peningkatan upah yang diterima individu sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Peningkatan upah ini akan meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Pendidikan

Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesobroto (1997) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang membedakan tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi bernilai besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, tetapi pada tahap ini peran investasi swasta sudah semakin membesar. Peran pemerintah pada tahap menengah tetap besar karena peran swasta yang terlalu besar akan menimbulkan kegagalan pasar dan menyebab-

kan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow (1971) mengatakan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyedia prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial bagi rakyat, seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam bidang pendidikan juga dalam kerangka penanaman nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan cenderung diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung, misalnya pendirian sekolah negeri. Harapannya, dengan menyuplai pelayanan pendidikan secara langsung, pemerintah lebih dapat mengontrol kurikulum dan standar pendidikan. Pengeluaran pemerintah ini berupa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik, akses ke sarana pendidikan, dan sebagainya.

Kemiskinan dan Pendidikan

Gunnar Myrdal (dalam Damanhuri, 2010) mengemukakan bahwa kemiskinan bukan terletak pada persoalan modal semata sebagaimana yang diutarakan kaum liberal, tetapi lebih karena kurangnya gizi, pendidikan, dan *basic need* lainnya. Menurut Myrdal (tahun ?), keadaan miskin bermula dari pendapatan yang rendah sehingga kualitas gizi menjadi kurang. Rendahnya kualitas gizi akan menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan dan akhirnya menyebabkan kemiskin-

an. Kemiskinan ini akan menyebabkan manusia tidak dapat memenuhi *basic need*, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga menyebabkan kemiskinan bagi generasi selanjutnya.

Beberapa studi tentang capaian pendidikan telah dilakukan di berbagai negara. Glewwe dan Kremer (2005) meneliti tentang partisipasi sekolah di negara-negara berkembang. Temuan yang penting dari studi mereka adalah bahwa partisipasi sekolah sangat dipengaruhi oleh sisi permintaan, di antaranya kesejahteraan keluarga. Anak dari keluarga miskin tidak dapat bersekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah, terutama di negara-negara yang pengeluaran pendidikannya sedikit, sehingga tidak mampu meringankan biaya pendidikan siswa. Selain itu, tingkat pendidikan orang tua, harapan tingkat pengembalian pada masa depan, dan jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan. Sementara itu, Handa (1999) dalam studinya di Afrika menemukan bahwa kebijakan pemerintah (untuk) memastikan bahwa orang tua berpendidikan dan berpenghasilan memadai sangat memengaruhi partisipasi sekolah anak.

Dilihat dari sisi pengeluaran pemerintah, Faguet dan Sanchez (2006) dalam studinya di Bolivia dan Kolombia menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah, selain variabel politik, sosial ekonomi, dan geografi.

Studi yang pernah dilakukan di Indonesia di antaranya adalah studi Suryadarma *et al.* (2006), Arze del Granado *et al.* (2007), Purwanto (2010), dan Listianawati (2012). Suryadarma *et al.* (2006) menemukan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga dan banyaknya sekolah yang dibangun berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Arze del Granado *et al.* (2007) menemukan bahwa kemiskinan dan tenaga kerja usia sekolah berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Jika dilihat dari

variabel desentralisasi, Purwanto (2010) menemukan bahwa variabel yang berpengaruh pada partisipasi SMP adalah rasio murid terhadap guru dan sekolah.

Sementara itu, Listianawati (2012) dalam studinya di Sulawesi Utara menemukan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah SMP adalah dana BOS, pengeluaran riil pendidikan dasar, PDRB per kapita, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan rasio murid terhadap guru dan sekolah. Variabel kemiskinan dalam studi Listianawati (2012) tidak berpengaruh terhadap partisipasi sekolah SMP. Hal ini berbeda dengan temuan Suryadarma dan Suryahadi (2009), serta Arze del Granado *et al.* (2007) yang menyimpulkan bahwa kemiskinan berpengaruh secara signifikan.

Studi ini mengacu pada penelitian Arze del Granado *et al.* (2007) dan Listianawati (2012). Arze del Granado *et al.* (2007) menemukan bahwa kemiskinan dan anak usia sekolah yang bekerja menjadi penghambat partisipasi sekolah anak. Sementara itu, Listianawati (2012) menemukan bahwa faktor yang memacu peningkatan partisipasi sekolah anak usia 13–15 tahun adalah dana BOS, pengeluaran riil pendidikan dasar, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga serta rasio murid terhadap guru. Adapun PDRB per kapita dan rasio sekolah terhadap murid berpengaruh negatif terhadap partisipasi sekolah SMP.

Studi ini meneliti berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah SMP di Jawa Barat baik dari segi ketersediaan fasilitas pendidikan berupa anggaran pendidikan (dalam hal ini BOS dan ketersediaan sekolah) maupun dari segi sosial ekonomi masyarakat yang tercermin pada PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, pendidikan orang tua, dan tingkat partisipasi kerja anak usia 13–15 tahun.

JEPI Vol. 15 No. 1 Juli 2014

Metode

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi pemerintah. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan sumber lainnya. Periode yang diteliti adalah tahun 2007–2011. Unit studi meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota.

Data yang digunakan antara lain data angka partisipasi sekolah untuk usia 13–15 tahun, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kemiskinan relatif, PDRB per kapita, dan rasio sekolah terhadap murid. Faktor sosial berupa persentase kepala rumah tangga berpendidikan di atas SMP dan proporsi anak usia 13–15 tahun yang bekerja diolah menggunakan data Susenas Kor tahun 2007–2011. Studi ini tidak memasukkan faktor kualitas mutu pendidikan dasar dan faktor kultural di setiap kabupaten/kota karena keterbatasan data.

Metode Analisis

Data panel digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan dasar. Analisis data panel secara garis besar dibedakan menjadi dua macam, yaitu statis dan dinamis. Pada analisis data panel dinamis, regressor-nya mengandung variabel *lag dependent*-nya, sedangkan pada analisis data panel statis tidak. Secara umum, terdapat dua pendekatan dalam metode data panel, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Keduanya dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya korelasi antara komponen eror dengan pengubah bebas. Pendekatan *one way* komponen eror hanya memasukkan komponen eror yang merupakan efek dari individu. Pendekatan *two way* memasukkan efek dari waktu ke dalam komponen eror.

Untuk memutuskan apakah akan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*, digunakan uji Hausman. Uji Hausman ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebuah model yang akan digunakan. Setelah kita memutuskan untuk menggunakan suatu model tertentu (FEM atau REM) berdasarkan uji Hausman, kita dapat melakukan uji terhadap asumsi yang digunakan dalam model, yaitu uji heteroskedastisitas dan uji otokorelasi.

Studi ini mengacu pada model yang digunakan Listianawati (2012) dan Arze del Granado *et al.* (2007) dengan APS sebagai variabel endogen pada model berikut:

$$\begin{aligned} \text{APS}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \ln \text{BOS}_{it} + \beta_2 \text{Murid_Sekolah}_{it} \\ & + \beta_3 \ln \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \text{Pendidikan_KRT}_{it} \\ & + \beta_5 \text{Miskin}_{it} + \beta_6 \text{Pekerja_Anak}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

dengan:

APS_{it} : APS SMP (%);

BOS_{it} : Bantuan Operasional Sekolah SMP (Rupiah);

Murid_Sekolah_{it} : Rasio Murid SMP terhadap Sekolah SMP;

PDRB_{it} : Pendapatan Regional Domestik Bruto Per kapita (Juta rupiah);

Pendidikan_KRT_{it} : persentase kepala rumah tangga di atas SMP (%);

Miskin_{it} : Angka Kemiskinan (%);

Pekerja_Anak_{it} : persentase anak usia 13–15 tahun yang bekerja;

β_k : koefisien parameter pada variabel;

i, t : untuk kabupaten/kota ke- i tahun ke- t ;

\ln : logaritma natural.

Variabel Operasional

Batasan/definisi operasional peubah-peubah dan istilah-istilah yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah usia 13–15 tahun adalah jumlah anak pada usia tersebut yang sedang bersekolah dan dalam

studi ini anak usia 13–15 tahun yang bersekolah diasumsikan bersekolah di SMP.

2. Angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok usia 13–15 tahun.
3. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB) adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat yang diukur pada tahun tertentu yang dipengaruhi oleh harga yang berlaku pada tahun tersebut.
4. PDRB per kapita adalah PDRB dibagi jumlah penduduk tengah tahun suatu daerah.
5. Rumah tangga (RT) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau bangunan sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur mempunyai makna bahwa mereka mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.
6. Kepala rumah tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau dianggap/ditunjuk sebagai KRT.
7. Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu RT, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun sedang tidak ada. ART yang telah bepergian enam bulan atau lebih dan ART yang bepergian kurang dari enam bulan, tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah enam bulan atau lebih tidak dianggap sebagai ART. Orang yang telah tinggal di RT enam bulan/lebih atau yang telah tinggal di RT kurang dari enam bulan, tetapi berniat pindah/bertempat ting-

gal di RT tersebut enam bulan atau lebih dianggap sebagai ART.

8. Angka Kemiskinan (P0) adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap seluruh jumlah penduduk kabupaten/kota. BPS setiap tahun menetapkan besarnya garis kemiskinan berdasarkan hasil Susenas modul konsumsi.

Hasil dan Analisis

Perkembangan APS SMP di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam bidang pendidikan dasar. Salah satu indikator capaian pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah (7–12 tahun; 13–15 tahun; 16–18 tahun) yang bersekolah terhadap seluruh penduduk kelompok usia sekolah (7–12 tahun; 13–15 tahun; 16–18 tahun). APS pendidikan dasar jenjang SD hampir mendekati target MDGs tahun 2015, yaitu sebesar 97,85% pada tahun 2011. Adapun untuk jenjang SMP, meskipun mengalami peningkatan, masih jauh dari target MDGs tahun 2015.

Pada tahun 2007, APS Provinsi Jawa Barat baru mencapai 80,36%. APS SMP terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2011 BPS mencatat APS SMP Provinsi Jawa Barat sebesar 85,69%. APS menggambarkan pemerataan akses pendidikan yang dapat dinikmati masyarakat. Capaian APS sebesar 85,69% menggambarkan masih ada sekitar 14,31% anak usia 13–15 tahun yang tidak menikmati pendidikan jenjang SMP yang terbagi atas 0,41% anak yang tidak belum/tidak pernah bersekolah dan 13,90% anak yang tidak bersekolah lagi. Anak yang tidak bersekolah lagi terdiri atas anak yang telah tamat SD dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP dan anak yang telah mengenyam pendidikan SMP,

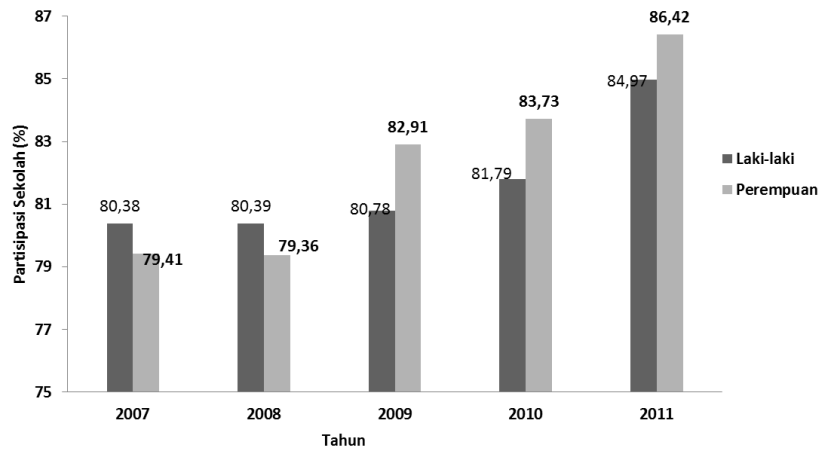
tetapi putus sekolah.

Dilihat dari proporsi jenis kelamin, sebelum tahun 2009, persentase anak laki-laki usia 13–15 tahun yang bersekolah lebih banyak dibanding anak perempuan, yaitu sebesar 80,38% pada tahun 2007 dan 80,39% pada tahun 2008. Adapun untuk anak perempuan usia 13–15 tahun, angkanya sebesar 79,41% dan 79,36% pada tahun 2007 dan 2008. Sejak tahun 2009, persentase anak perempuan yang bersekolah lebih banyak dibanding anak laki-laki, yaitu sebesar 82,91%, 83,73%, dan 86,42% pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Adapun persentase anak laki-laki hanya sebesar 80,78%, 81,79%, dan 86,42% pada tahun 2009, 2010, dan 2011 (Gambar 3).

Hal ini menunjukkan bahwa program pemerataan pendidikan untuk jenjang SMP telah berhasil mengurangi ketimpangan gender bidang pendidikan sebagaimana tujuan MDGs ketiga, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Anak perempuan usia 13–15 tahun di Provinsi Jawa Barat kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah hingga jenjang SMP.

Menurut tipe daerah, ada perbedaan antara APS anak usia 13–15 tahun di perkotaan dan perdesaan. APS anak usia 13–15 tahun di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Kondisi ini sedikit memberikan gambaran bahwa penduduk di perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan. Hal ini terkait dengan lebih maraknya jumlah sekolah di daerah perkotaan dan mudahnya akses ke sekolah dibandingkan dengan di perdesaan (Tabel 6).

Angka putus sekolah anak laki-laki usia 13–15 tahun cenderung lebih tinggi daripada anak perempuan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebaliknya, persentase anak usia 13–15 tahun yang tamat sekolah (dalam arti tidak melanjutkan sekolah) lebih didominasi anak perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi anak perempuan yang tidak bersekolah lagi karena tidak melanjutkan da-



Gambar 2: Tingkat Partisipasi Sekolah Anak Usia 13–15 Tahun Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007–2011
Sumber: BPS (2012), diolah

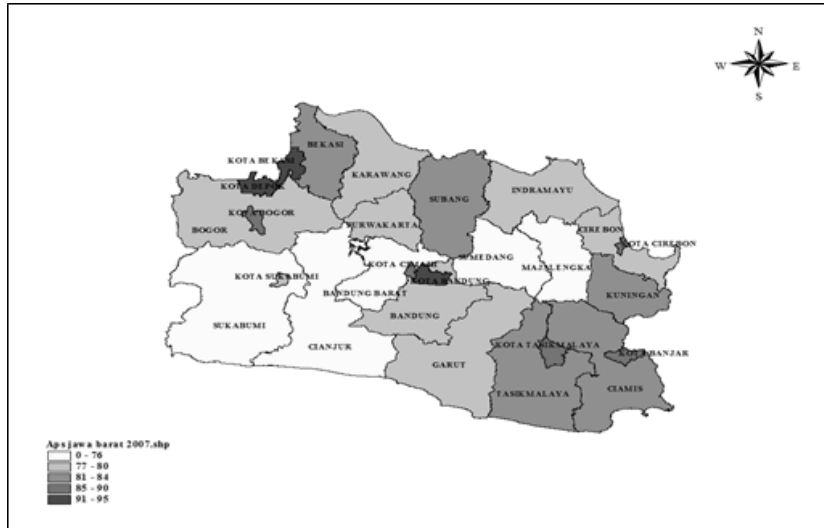
ri jenjang SD ke jenjang SMP lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Sementara itu, anak laki-laki yang tidak bersekolah lagi karena putus sekolah lebih banyak dibandingkan anak perempuan.

Perkembangan APS SMP di Jawa Barat disajikan dalam bentuk peta dengan lima gradasi warna (Gambar 4 & 5). Semakin gelap warnanya semakin tinggi APS-nya. Sebagai contoh, warna paling gelap menunjukkan APS di atas 90%. Berdasarkan data BPS tahun 2007, pada umumnya wilayah kota memiliki APS 84% ke atas, tiga di antaranya memiliki APS SMP di atas 90%, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bandung. Kota yang masih rendah APS-nya adalah Kota Sukabumi. Lima wilayah yang APS-nya pada kelompok terendah (di bawah 76%) adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Pada 2011, seluruh kabupaten/kota meningkat APS-nya, kecuali Kabupaten Bandung Barat. Wilayah yang mencapai APS lebih dari 91%, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar (Gambar 1).

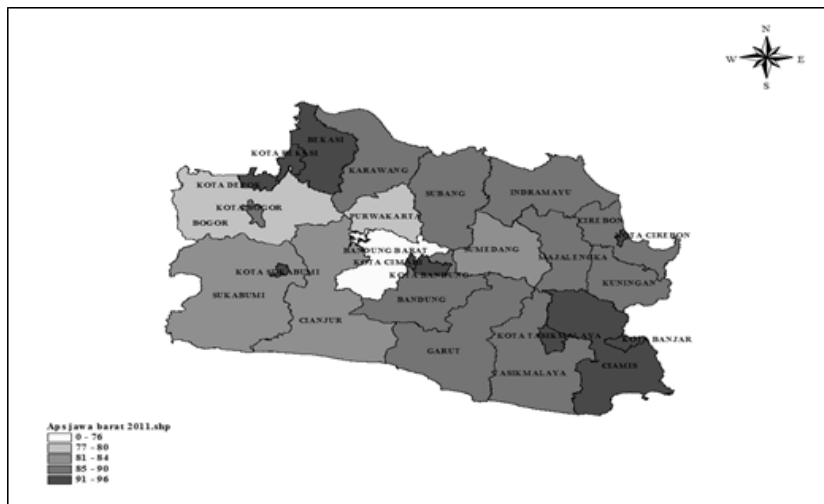
Meski demikian, peningkatan capaian APS

SMP di semua kabupaten/kota di Jawa Barat belum mencapai target MDGs kedua, yaitu 100% anak usia 7–15 tahun mendapatkan pendidikan dasar. Kabupaten/kota dengan APS SMP tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 adalah Kota Cirebon, Kota Bekasi, dan Kota Sukabumi dengan capaian APS SMP sebesar 95,71%, 94,56%, dan 94,32%. Adapun kabupaten/kota dengan capaian APS SMP terendah adalah Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Purwakarta dengan capaian APS SMP sebesar 76,20%, 76,95%, dan 78,40% (Tabel 3).

Kabupaten/kota dengan capaian APS SMP masih di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 79,91% pada tahun 2007 adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Sukabumi. Adapun pada tahun 2011, kabupaten/kota dengan APS SMP yang masih di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 85,69% adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan



Gambar 3: Peta APS SMP Jawa Barat Tahun 2007
 Sumber: BPS (2007), diolah



Gambar 4: Peta APS SMP Jawa Barat Tahun 2011
 Sumber: BPS (2011), diolah

Kabupaten Bandung Barat.

Pada umumnya, capaian APS SMP di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Capaian APS rata-rata wilayah kota lebih tinggi daripada wilayah kabupaten (Gambar 6). Pada tahun 2008, 17 dari 26 kabupaten/kota mengalami peningkatan APS dari tahun sebelumnya, yaitu rata-rata sebesar 1,77%. Pada tahun 2009, wilayah yang mengalami peningkatan APS SMP sebanyak 15 kabupaten/kota dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,58%. Adapun pada tahun 2010, hanya 13 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 19 kabupaten/kota dengan rata-rata peningkatan mencapai 5,4% per tahun.

Peningkatan APS yang signifikan dicapai oleh Kota Sukabumi, yaitu sebesar 17,80% dari 76,52% pada tahun 2007 menjadi 94,32% pada tahun 2011. Selain itu, peningkatan yang cukup tinggi dicapai oleh Kabupaten Sumedang pada tahun 2009, yaitu sebesar 89,42%, meningkat 17,60% dari capaian 71,82% pada tahun 2008. Namun, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan capaian APS SMP pada tahun-tahun berikutnya.

Kabupaten/kota yang APS SMP pada tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2007 adalah Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kabupaten Purwakarta walaupun dalam 5 tahun terakhir sempat mengalami peningkatan. Angka penurunan APS rata-rata dari kabupaten/kota yang mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 1,03%. Pada tahun 2009, rata-ratanya 3,8%, sedangkan tahun 2010 dan 2011 turun sebesar 3,4%.

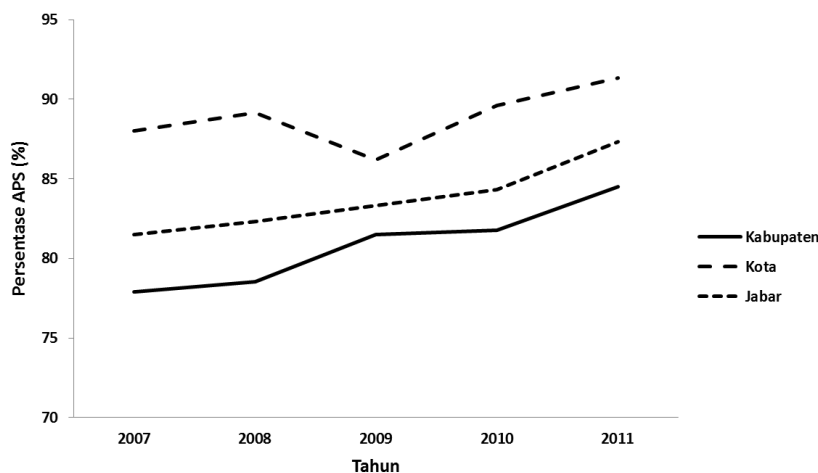
APS SMP Kabupaten Bogor pada tahun 2007 sebesar 77,19%. Pada tahun 2008, APS SMP-nya mengalami peningkatan sebesar 1,36% menjadi 78,55%. Namun, pada tahun 2009, APS SMP-nya menurun, bahkan lebih rendah dari tahun 2007, menjadi sebesar 75,35%. Pada tahun berikutnya mengalami peningkatan lagi sebesar 3,60% sehingga APS

SMP tahun 2010 sebesar 78,95%. Pada tahun 2011, APS SMP-nya kembali menurun dan lebih kecil dari tahun 2007, yaitu sebesar 76,95%. Pada tahun 2011, kabupaten yang APS SMP-nya berada di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 85,69% adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat.

Capaian APS dipengaruhi sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 1999/2000, anggaran pendidikan di Jawa Barat baru mencapai 7,57% dari APBD. Hingga tahun 2008, alokasi anggaran untuk pendidikan baru mencapai 11% dari total APBD. Itu artinya baru mencapai besaran Rp800 miliar dari Rp7 triliun APBD. Pada tahun 2009, anggarannya menjadi 20% dari APBD atau Rp1,6 triliun dari Rp8 triliun besaran APBD (Sugiatmo, 2011).

Sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, mulai tahun 2005, pemerintah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk meringankan biaya pendidikan dasar dengan alokasi per murid jenjang SMP di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2011 adalah Rp570.000,00 untuk murid di kabupaten dan Rp575.000,00 di kota. Jumlah itu meningkat dibandingkan pada tahun 2007 yang sebesar Rp354.000,00 (Tabel 4).

Fasilitas pendidikan lain di antaranya adalah ketersediaan sekolah. Sampai tahun 2011, jumlah sekolah jenjang SMP, baik umum maupun swasta, sebanyak 6.128 sekolah yang terdiri atas 2.240 sekolah madrasah tsanawiyah, 1.392 SMP negeri, dan 2.296 SMP swasta. Jumlah ini tersebar di 3.632 desa di Jawa Barat atau baru 61,51% desa di Jawa Barat yang memiliki sekolah setingkat SMP. Peningkatan jumlah sekolah swasta dari tahun ke tahun jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.



Gambar 5: Peningkatan Rata-rata APS SMP Provinsi Jawa Barat
Sumber: BPS (2011), diolah

Tabel 4: Alokasi Dana BOS per Tahun per Murid Jenjang SMP Tahun 2007–2011 (dalam rupiah)

Wilayah	2007	2008	2009	2010	2011
Kabupaten	354.000,00	354.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Kota	354.000,00	354.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00

Sumber: Kemdikbud (2011), diolah

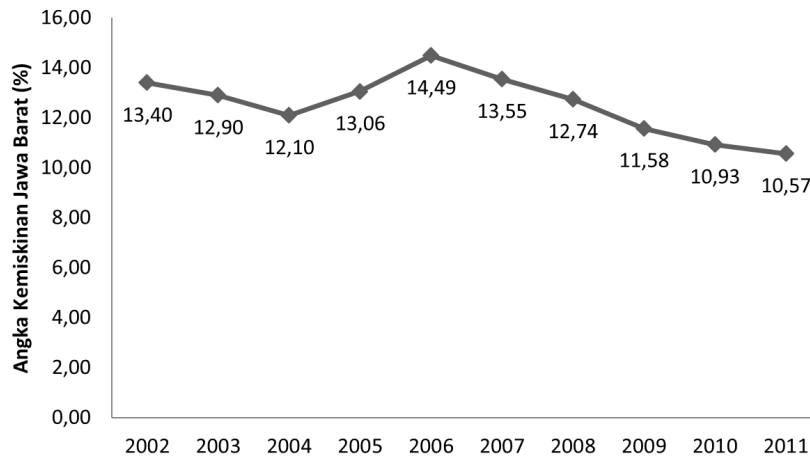
Rasio sekolah terhadap murid pada tahun 2011 di Jawa Barat rata-rata sebesar 382. Artinya satu sekolah dapat menampung 382 murid. Rasio tertinggi ada di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang yang besarnya 637 dan 638. Adapun wilayah dengan rasio terendah ada di Kota Tasikmalaya, yaitu sebesar 109.

Faktor lain yang turut memengaruhi capaian APS suatu wilayah adalah faktor sosial ekonomi berupa PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, pendidikan kepala rumah tangga, dan tingkat partisipasi kerja anak 13–15 tahun. PDRB per kapita merupakan gambaran kemampuan ekonomi masyarakat yang salah satunya untuk membiayai pendidikan. PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp19.645.670,00 (Atas Dasar Harga Berlaku) dan Rp7.828.804,00 (Atas Dasar Harga Konstan). PDRB per kapita tertinggi dicapai Kota Cirebon sebesar Rp40.161.130,00 dan terendah dicapai Kabupaten Tasikmalaya sebesar

Rp8.167.499,00.

Sejak tahun 2002 hingga 2004, angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari 13,40% menjadi 12,10% (Gambar 7). Pada tahun (2005 hingga) 2006, angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 14,49% pada tahun 2006. Hal ini dipengaruhi kebijakan pemerintah yang meningkatkan harga BBM sebesar 120%. Pada saat itu, peningkatan harga minyak dunia menyebabkan pembengkakan subsidi BBM dalam anggaran negara. Pemerintah pun menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban anggaran negara. Sejak 2006, angka kemiskinan terus mengalami penurunan hingga mencapai 10,57% pada tahun 2011.

Kemiskinan pun dapat menyebabkan anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk bersekolah. Tingkat kemiskinan relatif Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 yang tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya sebesar 19,98% dan terendah terjadi di



Gambar 6: Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2002–2011
Sumber: BPS (2012), diolah

Kota Depok hanya sebesar 2,75%. Anak-anak dari keluarga miskin biasanya bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah. Persentase tertinggi anak usia 13–15 tahun yang bekerja ada di Kabupaten Purwakarta sebesar 11,15% dan terendah ada di Kabupaten Bekasi sebesar 1,9% saja.

Kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi lebih mengerti pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, tingkat pendidikan kepala rumah tangga dapat memengaruhi partisipasi sekolah anak. Persentase tertinggi kepala rumah tangga berpendidikan di atas SMP ada di Kota Bekasi sebesar 60,01% dan terendah di Kabupaten Cianjur sebesar 12,87%.

Determinan APS SMP Jawa Barat

Studi ini menggunakan model regresi data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi determinan *output* pendidikan dasar jenjang SMP secara regional. *Output* pendidikan yang dipakai adalah APS sebagai indikator pemerataan akses pendidikan yang dihitung dari banyaknya anak usia 1315 tahun yang masih bersekolah di jenjang SMP di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Model ini

menggunakan data sekunder BPS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Departemen Keuangan. Data yang dianalisis meliputi 26 wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat selama lima tahun, yaitu tahun 2007–2011.

Dari uji signifikansi model (Tabel 5) terlihat bahwa variabel-variabel *input* secara bersama-sama memengaruhi tingkat partisipasi sekolah. Pada model yang terpilih, faktor-faktor yang memengaruhi APS SMP adalah PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, pendidikan kepala rumah tangga, partisipasi kerja anak usia 13–15 tahun, dan rasio sekolah terhadap murid.

PDRB per Kapita

Variabel PDRB per kapita merupakan indikator makro tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat PDRB per kapita mencerminkan kemampuan ekonomi masyarakat yang salah satunya untuk membiayai pendidikan. Hipotesis awalnya, semakin tinggi PDRB per kapita semakin tinggi APS jenjang SMP. Pada tingkat signifikansi 1% dengan koefisien LnPDRB sebesar 22,23640, hipotesis awal itu diterima. Hal ini berarti setiap peningkatan PDRB per kapita sebesar 1% akan meningkatkan APS sekitar

Tabel 5: Faktor-faktor yang Memengaruhi APS SMP di Jawa Barat

Variabel	Koefisien	Probabilitas
C	-71,428180	0,1751
LNBOSS	-3,012501	0,2199
MURID_SEKOLAH	-0,010637	0,0236
LNPDRB	22,236400	0,0001
PENDIDIKAN_KRT	0,300477	0,0001
MISKIN	-0,196790	0,0977
PEKERJA_ANAK	-0,311947	0,0333
<i>R-squared</i>	0,857653	
<i>Adjusted R-squared</i>	0,812160	
<i>S.E. of regression</i>	3,196863	
<i>F-statistic</i>	18,852650	
<i>Prob. (F-statistic)</i>	0,000000	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

22,24%.

Hipotesis awal lain, semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat maka semakin mampu mereka untuk menyekolahkan anaknya minimal sampai tingkat SD dan SMP. Hasil studi di dalam model ekonometrik menunjukkan kenaikan PDRB per kapita berbanding lurus dengan partisipasi sekolah usia 13–15 tahun. Artinya, kenaikan pendapatan per kapita akan meningkatkan partisipasi sekolah. Hasil ini sesuai dengan studi Sanchez dan Sbrana (2010), Zhao dan Glewwe (2010), dan Handa (1999). Sanchez dan Sbrana (2010) menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan partisipasi sekolah. Sementara itu, Handa (1999) menemukan bahwa peningkatan pendapatan berefek besar pada peningkatan partisipasi sekolah.

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai stok manusia. Nilai yang diperoleh dari investasi pendidikan di antaranya adalah meningkatnya pendapatan. Adapun untuk meningkatkan nilai stok manusia, seseorang/rumah tangga perlu mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan. Hubungan antara biaya dan manfaat pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *private rate of return* dan *social rate of return*. Peningkatan nilai atau kemampuan manusia, dalam hal ini tenaga kerja, akan memberikan dampak positif terhadap produktivitasnya. Se-

JEPI Vol. 15 No. 1 Juli 2014

lanjutnya, peningkatan produktivitas akan meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja dan meningkatkan *output* perekonomian.

Biaya yang harus ditanggung orang tua siswa SMP di Jawa Barat masih jauh lebih besar dibanding biaya pendidikan jenjang SMP yang dikeluarkan pemerintah, baik biaya operasional maupun biaya investasi. Sebagai contoh, pada sekolah bermutu rendah saja, orang tua harus menyediakan biaya sebesar Rp2.720.000,00 untuk biaya perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang jajan, biaya ekstrakurikuler, dan biaya tambahan bimbingan belajar. Sementara itu, biaya yang disediakan pemerintah hanya sebesar Rp484.014,14 (Meirawan *et al.*, 2009).

Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Hasil estimasi menunjukkan pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh positif terhadap partisipasi sekolah usia 13–15 tahun. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang berpendidikan di atas SMP semakin besar kemauan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin besar jumlah kepala rumah tangga yang berpendidikan di atas SMP semakin banyak anak yang bersekolah karena orang tua mereka menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan lebih tinggi dari orang tuanya. Hal ini sejalan dengan studi Glewwe (2002), Handa

(1999), Black *et al.* (2003), Suryadarma *et al.* (2006), dan Listianawati (2012) bahwa pendidikan orang tua berperan dalam meningkatkan partisipasi sekolah anak.

Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa salah satu faktor sosial ekonomi terpenting adalah pendidikan kepala rumah tangga. Semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga semakin tinggi kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya. Sanchez dan Sbrana (2010) menemukan bahwa pendidikan ayah sebagai kepala keluarga signifikan memengaruhi peluang anak laki-laki bersekolah atau tidak karena ayah dilihat sebagai contoh dalam keluarga.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2011, persentase pendidikan kepala rumah tangga yang berpendidikan di atas SMP di Jawa Barat rata-rata sekitar 29,80%. Ini berarti sekitar 30% kepala keluarga di Jawa Barat berpendidikan minimal SMA. Kondisi ini bervariasi antar-kabupaten/kota. Persentase kepala rumah tangga yang berpendidikan di atas SMP tertinggi di Kota Bekasi sebesar 60,01% dan terendah di Kabupaten Cianjur sebesar 12,87%.

Kemiskinan

Dilihat dari tabel hasil regresi, peubah kemiskinan berpengaruh negatif terhadap APS SMP. Peningkatan tingkat kemiskinan sebesar 1% akan menurunkan nilai APS sebesar 0,19%. Hal ini sejalan dengan studi Arze del Granado *et al.* (2007) serta Suryadarma dan Suryahadi (2009). Arze del Granado *et al.* (2007) menyebutkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi memerlukan biaya yang lebih tinggi pula sehingga masyarakat miskin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membiayai sekolah anaknya tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang rendah dapat mencapai APS SMP yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data, dengan persentase penduduk miskin sebe-

sar 6,12%, capaian APS Kota Bekasi mencapai 95,71%. Adapun capaian APS Kabupaten Bandung Barat sebesar 76,20% dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,22%. Pada tahun 2011, banyaknya penduduk miskin Jawa Barat yang berpendidikan tamat SD/SMP sebesar 63,83%, sedangkan yang tamat SMA hanya 6,14%. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat miskin untuk bersekolah tinggi semakin rendah. APS SMP masyarakat miskin Jawa Barat hanya sebesar 67,70% dengan APS tertinggi di Kota Depok sebesar 100% dan terendah di Kabupaten Purwakarta sebesar 39,99%.

Terdapat hubungan positif antara APS wilayah dengan APS masyarakat miskin di suatu wilayah. Kota Cirebon dengan APS penduduk miskin sebesar 91,11% mampu mencapai APS total sebesar 95,71%. Begitu pula dengan Kabupaten Bogor yang memiliki capaian APS penduduk miskin sebesar 44%, APS seluruhnya pun hanya sebesar 76,95%. Semakin tinggi pendidikan semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Pendidikan SMP membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada pendidikan SD sehingga sebagian penduduk tidak bisa menjangkaunya, terutama masyarakat miskin. Rumah tangga miskin tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi meskipun sekolahnya tersedia.

Biaya yang harus ditanggung keluarga untuk menyekolahkan anak tidak hanya SPP yang saat ini sudah dibantu pemerintah melalui BOS. Biaya pendidikan terdiri atas biaya langsung dan biaya kesempatan (*opportunity cost* atau *earning foregone*). Biaya pendidikan langsung yang dikeluarkan orang tua, di antaranya uang pangkal/gedung, daftar ulang, SPP, POMG, praktikum/keterampilan, iuran OSIS, biaya evaluasi (ujian), bahan penunjang mata pelajaran, seragam sekolah dan olahraga, buku pelajaran/diktat, alat tulis dan perlengkapannya, transportasi, serta kursus (bimbingan belajar) di sekolah. Adapun biaya kesempatan menunjukkan besarnya biaya yang hilang karena memilih untuk bersekolah bukan

untuk bekerja.

Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Pendidikan SMP membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada pendidikan SD yang tidak bisa dipenuhi rumah tangga miskin. Rata-rata biaya langsung yang harus dikeluarkan orang tua siswa SMP untuk bersekolah di sekolah bermutu rendah saja di Jawa Barat adalah sebesar Rp2.720.000,00 per tahun. Untuk sekolah bermutu sedang dan tinggi biayanya sebesar Rp5.209.300,00 dan Rp8.930.000,00 per anak per tahun (Meirawan *et al.*, 2009). Biaya ini hanya untuk biaya perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang jajan, biaya ekstrakurikuler, dan biaya tambahan bimbingan belajar.

Di sisi lain, garis kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 adalah Rp234.622,00 per kapita/bulan atau sebesar Rp2.815.464,00 per kapita/tahun. Biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin untuk menyekolahkan anak di SMP bermutu rendah saja akan menghabiskan 96% dari total pengeluaran per kapitanya.

BOS yang diharapkan mampu meringankan biaya sekolah bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan APS SMP di Jawa Barat. Hal ini dimungkinkan karena biaya yang harus dikeluarkan masyarakat di luar BOS masih tinggi. Selain itu, sasaran BOS adalah murid yang bersekolah sehingga masyarakat miskin yang tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya di luar BOS, seperti biaya transportasi, belum dapat memanfaatkan dana BOS. Selain BOS, pemerintah juga menyelenggarakan program Beasiswa Siswa Miskin (BSM) untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menyekolahkan anaknya di jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Selama 6 tahun terakhir, penyelenggaraan program beasiswa miskin dinilai telah memberi kontribusi terhadap percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sekaligus menekan angka putus sekolah

JEPI Vol. 15 No. 1 Juli 2014

(Bappenas, 2010).

Pekerja Anak

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam capaian APS adalah bahwa kemiskinan mendorong anak-anak dari rumah tangga miskin masuk dunia kerja lebih awal. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pekerja anak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah. Hal ini sejalan dengan studi Arze del Granado *et al.* (2007) yang menyimpulkan adanya *trade off* antara bekerja dan sekolah. Hal ini disebabkan bersekolah memerlukan biaya, sedangkan bekerja dapat menghasilkan uang untuk membantu pendapatan keluarganya.

Menurut Todaro dan Smith (2006), orang tua di negara berkembang masih memandang anak sebagai tenaga kerja yang dapat membantu kehidupan orang tua. Pekerja anak dibutuhkan untuk menambah penghasilan. Jika anak bersekolah, keluarganya akan kehilangan sebagian pendapatan yang mungkin didapat. Orang tua berpikir *opportunity cost* seorang anak yang bekerja lebih menguntungkan daripada bersekolah.

Persentase anak usia 13–15 tahun yang bekerja di Jawa Barat selama tahun 2011 rata-rata sebesar 5,48%. Anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk sekolah. Tingginya biaya sekolah membuat anak usia sekolah terpaksa bekerja untuk membiayai sekolahnya, bahkan membantu menambah penghasilan keluarga. Pada tahun 2011, sebanyak 45,39% penduduk miskin tidak bekerja. Hal ini mendorong anak-anak meninggalkan sekolah karena tidak ada biaya untuk sekolah, bahkan mereka terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga.

Persentase anak putus sekolah di Jawa Barat pada tahun 2011 adalah 2,43% dengan persentase tertinggi di Kabupaten Purwakarta 7,78%. Kabupaten Purwakarta dengan persentase anak usia 13–15 tahun yang bekerja sebesar 11,15% memiliki capaian APS sebe-

sar 78,40% dan Kota Bekasi dengan persentase anak usia 13–15 tahun yang bekerja 2,92% memiliki APS SMP sebesar 94,56%.

Rasio Sekolah terhadap Siswa

Faktor berikutnya yang memengaruhi APS suatu wilayah adalah rasio sekolah terhadap murid. Pengaruh negatif rasio ini pada partisipasi sekolah SMP menggambarkan sedikitnya SMP di suatu wilayah sehingga SMP lain harus menampung lebih banyak siswa. Untuk Kabupaten Purwakarta yang 52% desanya tidak memiliki SMP, rasio sekolah terhadap muridnya mencapai 636. Oleh karena itu, APS SMP Kabupaten Purwakarta pada tahun 2011 hanya sebesar 78,40%. Begitu pula di Kabupaten Cianjur yang APS-nya mencapai 81,79% pada tahun 2011, ternyata rasio sekolah terhadap muridnya pada tahun tersebut adalah 438. Hal ini terjadi karena sebanyak 44% desa di Kabupaten Cianjur tidak memiliki sekolah SMP.

Sesuai dengan laporan Bappenas, salah satu faktor yang memengaruhi capaian pendidikan adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan (Bappenas, 2010). Sedikitnya sekolah yang ada mengakibatkan anak sekolah harus menempuh jarak yang lebih jauh agar dapat bersekolah. Jarak tempuh yang jauh akan menambah biaya transportasi ke sekolah sehingga murid dari keluarga tidak mampu akan memilih untuk tidak bersekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa dalam kabupaten/kota tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki, yaitu maksimal 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

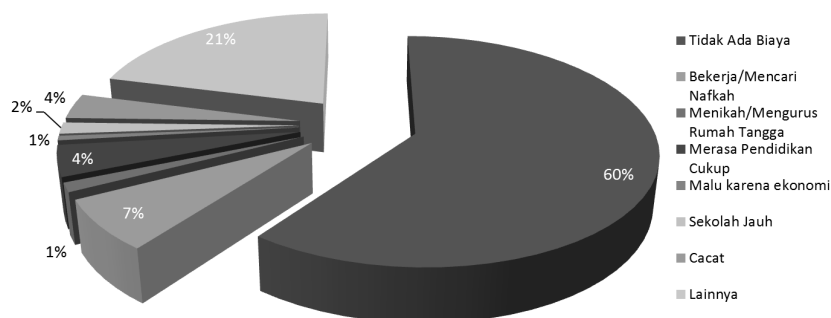
Berdasarkan data Podes 2011, kabupaten yang lebih dari 50% desanya tidak memiliki sekolah setingkat SMP adalah Kabupaten Ku-

ningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang. Adapun di Kabupaten Cianjur, anak sekolah di 49 desanya harus menempuh jarak lebih dari 6 km untuk mencapai sekolah setingkat SMP di daerah lain (Gambar 7).

Seperti terlihat pada Gambar 7, berdasarkan survei Susenas 2011, sebanyak 60% anak usia 13–15 tahun tidak bersekolah karena tidak ada biaya, sedangkan anak yang tidak bersekolah karena bekerja atau mencari nafkah sebanyak 7% dan anak yang tidak bersekolah karena jarak sekolahnya jauh sebanyak 2%.

Dilihat dari jenis daerah dan jenis kelamin (Tabel 5), anak yang tidak sekolah di daerah perkotaan karena tidak ada biaya cenderung didominasi oleh anak perempuan, yaitu sebanyak 62,1%. Sementara itu, di daerah perdesaan, baik anak laki-laki maupun perempuan, persentasenya hampir sama sekitar 60%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa anak laki-laki di perkotaan cenderung dibiayai sekolahnya dibandingkan dengan anak perempuan. Adapun di perdesaan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama tidak dapat bersekolah karena tidak ada biaya.

Tingkat kemiskinan di daerah perdesaan umumnya lebih tinggi dibanding perkotaan sehingga ketiadaan biaya sekolah ditambah akses yang pendidikan yang masih sedikit sehingga meningkatkan biaya transportasi ke sekolah akhirnya menurunkan partisipasi sekolah anak di perdesaan. Anak di daerah perdesaan menyatakan bahwa jauhnya jarak sekolah sebagai alasan tidak bersekolah dengan perbandingan 11 kali lipat lebih besar dibandingkan anak laki-laki di perkotaan dan 4 kali lipat lebih besar dibandingkan anak perempuan di perkotaan. Dilihat dari jenis kelamin secara umum, anak perempuan lebih banyak mengemukakan alasan jauhnya jarak sekolah. Hal ini disebabkan anak perempuan cenderung tidak diizinkan untuk menempuh sekolah yang jaraknya jauh.



Gambar 7: Alasan Anak Usia 13–15 Tahun Tidak Bersekolah pada Tahun 2011
Sumber: Susenas (2011), diolah

Tabel 6: Persentase Anak Usia 13–15 Tahun yang Pernah/Masih Bersekolah Menurut Jenis Daerah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2011

Jenis Daerah	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	Masih Sekolah	Putus Sekolah	Tamat Sekolah	Masih Sekolah	Putus Sekolah	Tamat Sekolah	Masih Sekolah	Putus Sekolah	Tamat Sekolah
Perkotaan	94,0	2,8	3,3	94,6	1,9	3,5	94,3	2,4	3,4
Perdesaan	92,6	3,4	4,0	92,6	2,6	4,7	92,6	3,0	4,4
Perkotaan + Pedesaan	93,5	3,0	3,5	93,9	2,2	4,0	93,7	2,6	3,7

Sumber: BPS (2012), diolah

Kemiskinan juga berimplikasi pada anak-anak yang bekerja di usia sekolah. Anak-anak perkotaan yang beralasan mereka harus bekerja sehingga tidak dapat bersekolah hampir 3 kali lipat dibandingkan anak-anak di pedesaan. Alasannya, anak-anak miskin perkotaan cenderung mudah diserap lapangan pekerjaan informal yang tersedia di perkotaan. Dilihat dari jenis kelamin, anak perempuan perkotaan yang beralasan tidak sekolah karena bekerja lebih banyak dibanding anak laki-lakinya. Umumnya mereka bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga.

Baik di pedesaan maupun perkotaan, persentase anak perempuan yang tidak bersekolah karena menikah atau mengurus rumah tangga lebih besar daripada anak laki-lakinya. Di daerah pedesaan, anak perempuan cenderung beralasan menikah, sedangkan di perkotaan cenderung mengurus rumah tangga sementara orang tuanya bekerja.

Selain itu, anak-anak di daerah pedesaan

cenderung merasa telah memiliki pendidikan yang cukup hanya dengan lulus SD sehingga mereka tidak perlu melanjutkan ke jenjang SMP. Alasan malu karena ekonomi lebih didominasi anak laki-laki di perkotaan.

Simpulan

Keragaman APS SMP di Jawa Barat menunjukkan capaian yang semakin baik terlihat dari semakin sedikitnya kabupaten/kota dengan capaian APS yang rendah. Namun, APS SMP di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat belum ada yang mencapai target MDGs. Faktor utama yang memengaruhi capaian APS SMP di Jawa Barat adalah faktor sosial ekonomi yang tercermin pada signifikansi variabel PDRB, kemiskinan, tingkat pekerja anak usia 13–15 tahun, dan pendidikan kepala rumah tangga. Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, variabel yang memengaruhi APS

SMP di Jawa Barat adalah rasio sekolah terhadap murid. Tingginya rasio ini mencerminkan masih kurang memadainya jumlah sekolah yang mengakibatkan bertambahnya biaya transportasi anak ke sekolah. Sementara itu, variabel BOS belum efektif menunjang peningkatan partisipasi sekolah SMP di Jawa Barat.

Untuk meningkatkan APS, diperlukan peningkatan PDRB yang merupakan syarat cukup peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan turut meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat menekan laju peningkatan pekerja anak.

Peningkatan anggaran pendidikan sebaiknya lebih difokuskan pada peningkatan ketersediaan sekolah agar dapat mengurangi beban biaya sekolah sehingga siswa tidak mampu dapat tetap bersekolah. Di samping itu, pemerintah juga diharapkan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan BOS sehingga lebih signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan APS SMP di Jawa Barat.

Daftar Pustaka

- [1] Akai, N., Sakata, M., & Tanaka, R. (2007). Fiscal Decentralization and Educational Performance. *Conference Paper, C07-001*. Berkeley: Institute of Business and Economic Research, University of California. http://urbanpolicy.berkeley.edu/pdf/JapanBerkSymp/Akai_Sakata_Tanaka_Fiscal_Decentralization_Education.pdf (Diakses 15 Juli 2013).
- [2] Arze del Granado, F. J., Fengler, W., Ragatz, A., & Yafuz, E. (2007). Investing in Indonesia's Education: Allocation, Equity and Efficiency of Public Expenditures. *World Bank Policy Research Working Paper, 4329*. World Bank: The World Bank Poverty Reduction and Economic Management and Human Development of the East Asia and Pacific Region.
- [3] Bappenas. (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [4] Black, S. E., Devereux, P. J., & Salvanes, K. G. (2003). Why the Apple Doesn't Fall Far: Understanding Intergenerational Transmission of Human Capital. *NBER Working Paper, 1066*. Cambridge: National Bureau of Economic Research. <http://www.nber.org/papers/w10066.pdf> (Diakses 15 Juli 2013).
- [5] Boissiere, M. (2004). Determinants of Primary Education Outcomes in Developing Countries. *OED Working Paper, 39157*. Washington, D.C.: The World Bank Operations Evaluation Department. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/03/28/000090341_20070328103607/Rendered/PDF/391570education1eterminants01PUBLIC1.pdf (Diakses 5 Februari 2013).
- [6] BPS. (2007). *Angka Partisipasi Kasar Menurut Propinsi 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [7] BPS. (2011). *Angka Partisipasi Kasar Menurut Propinsi 2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [8] BPS. (2012). *Jawa Barat dalam Angka 2012*. Bandung: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat.
- [9] Damanhuri, D. S. (2010). *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*. Bogor: IPB Press dan STEI Tazkia.
- [10] Faguet, J-P. & Sánchez, F. (2006). Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia and Colombia. *World Development, 36* (7), 1294–1316.
- [11] Glewwe, P. (2002). Schools and Skills in Developing Countries: Education Policies and Socioeconomic Outcomes. *Journal of Economic Literature, 40* (2), 436–482.
- [12] Glewwe, P. & Kremer, M. (2005). *Schools, Teachers and Education Outcomes in Developing Countries*. Second draft of chapter for Handbook on the Economics of Education.
- [13] Handa, S. (1999). Raising Primary School Enrollment in Developing Countries: The Relative Importance of Supply and Demand. *FCND Discussion Paper, 76*. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute. Food Consumption and Nutrition Division. <http://cdm15738.contentdm.oclc.org/utills/getfile/collection/p15738coll12/id/125776/filename/125807.pdf> (Diakses 5 Februari 2013).
- [14] Kemdikbud. (2012). *Indonesia Educational Statistical in Brief 2011/2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- [15] Listianawati, I. (2012). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendidikan Dasar di Sulawesi Utara. *Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [16] Mangkoesobroto, G. (1997). *Ekonomi Publik*. Edisi ke-3. Yogyakarta: BPFE.
- [17] Meirawan, D., Permana, J., Bakar, A., Triatna, C., & Hartini, N. (2009). *Analisis Sharing*

- Dana Pendidikan di Jawa Barat*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195908141985031-JOHAR_PERMANA/RINGKASAN_HASIL_PENELTIAN.pdf (Diakses 5 Februari 2013).
- [18] Purwanto, D. A. (2010). Decentralization and Its Impact on Primary Education Outcomes. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 25 (1), 41–58.
- [19] Rostow, W. W. (1971). *Politics and the Stages of Growth*. Cambridge: Cambridge University Press
- [20] Sánchez, M. V., & Sbrana, G. (2010). Determinants of Education Attainment and Development Goals in Yemen. *Unedited draft V1 - 130509*. New York: Development Policy and Analysis Division, United Nations. http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_workshops/entebbe_training_mdgs/ntbtraining/sanchez_sbrana2009yemen.pdf (Diakses 28 Februari 2013).
- [21] Sugiarto, H. B. (2011). Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan (Studi Alokasi Anggaran dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Provinsi Jawa Barat). *Dissertasi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- [22] Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2009). The Contrasting Role of Ability and Poverty on Education Attainment: Evidence from Indonesia. *SMERU Working Paper, November 2009*. Jakarta: SMERU Research Institute. <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/abilitypovertyoneducation.pdf> (Diakses 15 Juli 2013)
- [23] Suryadarma, D., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2006). Causes of Low Secondary School Enrollment in Indonesia. *SMERU Working Paper, August 2006*. Jakarta: The SMERU Research Institute. <http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/enrollmenteng06.pdf> (Diakses 5 Februari 2013).
- [24] Susenas. (2011). *Survey Sosial Ekonomi Nasional 2007–2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [25] Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Jakarta: Erlangga.
- [26] Zhao, M., & Glewwe, P. (2010). What Determines Basic School Attainment in Developing Countries? Evidence from rural China. *Economics of Education Review*, 29 (3): 451–460.